

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019: DARI SISTEM KE MANAJEMEN PEMILU

Jakarta, Minggu 2 Februari 2020



Perludem
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI



www.perludem.org



@pemiludandemokrasi



@perludem



@perludem



Latar Belakang

- Pemilu serentak hadir sebagai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 yang mengubah waktu penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif yang pada awalnya terpisah menjadi diselenggarakan pada waktu yang bersamaan.
- Kurang dari satu minggu pasca penyelenggaraan muncul wacana untuk merubah desain pemilu serentak:
 - Memisahkan kembali pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden;
 - Merubah sistem pemilu proposional daftar terbuka
 - Penggunaan e-voting
- Kompleksitas dan persoalan-persoalan yang dihadapi di Pemilu Serentak 2019 memang perlu dievaluasi, Namun evaluasi tersebut tidak bisa dilakukan secara reaksioner dengan memilih opsi-opsi penggunaan teknologi pemilu saja atau kembali memisahkan pemilu legislatif dan eksekutif layaknya tiga pemilu sebelumnya (2004, 2009, 2014).
- Evaluasi komperhensif yang tidak hanya menitikberatkan pada dimensi manajemen penyelenggaraan semata, namun pada dimensi sistem pemilu juga. Hal ini karena antara pilihan sistem pemilu dengan manajemen pemilu memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Tujuan

- Membaca persoalan-persoalan apa saja yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019;
- Faktor-faktor apa saja yang ikut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dari Pemilu Serentak yakni efektivitas sistem pemerintahan presidensial dan efisiensi penyelenggaraan pemilu;
- Merumuskan pilihan-pilihan perbaikan kedepan dari segi sistem dan manajemen pemilu yang tidak dapat dipisahkan keduanya, dalam rangka mencapai tujuan dari kehadiran pemilu serentak.

Metode Penelitian

Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
Primer	Wawancara	<ul style="list-style-type: none">• KPU Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung;• Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung;• Partai Politik Peserta Pemilu;• Jurnalis.
	Diskusi Terfokus	<ul style="list-style-type: none">• KPU dan Bawaslu RI;• Akademisi;• Masyarakat Sipil;• KPU Provinsi DKI Jakarta;
Sekunder	Dokumen dan literature review	<ul style="list-style-type: none">• Hasil Pemilu Serentak 2019;• Dokumen-dokumen relevan lainnya;• Buku dan hasil penelitian relevan mengenai pemilu.• Pemberitaan media

Evaluasi Pemilu 2019: dari Sistem ke Manajemen



www.perludem.org



[@pemiludandemokrasi](https://www.facebook.com/pemiludandemokrasi)



[@perludem](https://twitter.com/perludem)



[@perludem](https://www.instagram.com/perludem)

Asal Usul Pemilu Serentak

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013
- Merujuk pada pendapat Mahkamah terdapat dua latar belakang dibalik kehadiran pemilu serentak:
 - Mempertegas sistem pemerintahan presidensial, terutama posisi presiden sebagai *single chief executive* dan meminimalisir terciptanya koalisi partai pengusung presiden yang bersifat taktis dan sesaat, melainkan jangka panjang dalam rangka penyederhanaan partai politik.
 - Efisiensi penyelenggaraan pemilu dari segi anggaran, waktu, dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. *Check and balances* dalam pemerintahan presidensial salah satunya dapat ditunjang melalui penggunaan hak pilih secara cerdas dan efisien sesuai keyakinan sendiri, untuk itu warga negara dapat mempertimbangkan secara mandiri mengenai penggunaan pilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden. (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013, hlm. 8)
- *Coattail effect* atau efek bawan terhadap *vote share* yang didapatkan oleh partai politik pengusung presiden di pemilu legislatif.

Perbandingan Waktu Pemilu dan Perolehan Kursi Koalisi Partai Politik

Tahun Pemilu	Waktu Pemilu	Presiden Terpilih	Partai Koalisi Presiden Putaran I	Jumlah Kursi Legislatif	Kursi Koalisi Partai Presiden	Kursi Partai Lain
2004	Tidak serentak	Susilo Bambang Yudhoyono & Jusuf Kalla	Demokrat, PBB, PKPI	550	67	483
2009	Tidak serentak	Susilo Bambang Yudhoyono & Boediono	Demokrat, PPP, PKB, PKS, PAN	560	317	243
2014	Tidak serentak	Joko Widodo & Jusuf Kalla	PDIP, PKB, Nasdem, Hanura	560	208	352



Tujuan

- Menghadirkan *coattail effect*
- Efisiensi/kemudahan pemilih dalam memberikan pilihannya
- Efisiensi tata kelola penyelenggaraan



Realitas

- Coattail effect tidak signifikan
- Pemilih kebingungan/invalid vote tinggi
- Kompleksitas tata kelola penyelenggaraan

COTTAIL EFFECT TIDAK BEREFEK

Partai Politik	Pemilu Legislatif 2014				Pemilu Serentak 2019			
	Perolehan Suara	% Suara	Perolehan Kursi	% Kursi	Perolehan Suara	% Suara	Perolehan Kursi	% Kursi
PDIP	23.673.018	19,4	109	19,5	27.053.961	21,4	128	22,3
Golkar	18.424.715	15,1	91	16,3	17.229.789	13,6	85	14,8
Gerindra	14.750.043	12,1	73	13,0	17.594.839	13,9	78	13,6
Nasdem	8.412.949	6,9	36	6,4	12.661.792	10	59	10,3
PKB	11.292.151	9,3	47	8,4	13.570.097	10,7	58	10,1
Demokrat	12.724.509	10,4	61	10,9	10.876.507	8,6	54	9,4
PKS	8.455.614	6,9	40	7,1	11.493.663	9,1	50	8,7
PAN	9.459.415	7,8	48	8,6	9.572.623	7,6	44	7,7

COALITIONAL EFFECT

Koalisi Partai Politik	Perolehan Suara	%	Perolehan Kursi DPR	%
Koalisi Jokowi-Ma'ruf (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP)	76.838.786	60,8	349	60,7
Koalisi Prabowo-Sandi (Gerindra, PKS, Demokrat, PKS, PAN)	49.537.632	39,2	226	39,3

Coattail Effect di Level DPRD Provinsi Lampung

Kabupaten/Kota	Koalisi Jokowi-Ma'ruf				Koalisi Prabowo-Sandi			
	Pilpres	%	DPRD Provinsi	%	Pilpres	%	DPRD Provinsi	%
Kota Bandar Lampung	259.674	46,7	280.028	55,6	296.741	53,3	223.691	44,4
Pringsewu	149.481	61,8	107.140	57	92.344	38,2	80.826	43
Lampung Selatan	374.955	65,1	353.886	62,9	201.440	34,9	208.628	37,1
Kota Metro	52.122	52,5	42.274	42,6	47.184	47,5	57.008	57,4
Pesawaran	155.496	58,2	137.367	57,3	111.879	41,8	102.349	42,7
Lampung Barat	101.247	57,1	98.708	61,3	76.170	42,9	62.212	38,7
Tanggamus	165.654	48,6	159.469	52,7	174.866	51,4	143.100	47,3
Pesisir Barat	46.513	52	55.795	50,5	42.977	48	54.794	49,5
Lampung Utara	153.406	43	181.642	61,5	203.515	57	113.656	38,5
Waykanan	143.456	53,7	131.467	54,3	123.524	46,3	110.548	45,7
Mesuji	85.471	71,6	73.510	67,5	33.906	28,4	35.431	32,5
Tulang Bawang Barat	105.789	63,8	85.116	62,6	59.972	36,2	50.845	37,4
Tulang Bawang	152.265	68,4	128.381	65	70.186	31,6	69.274	35
Lampung Tengah	490.901	67,1	417.011	57,9	241.154	32,9	303.011	42,1
Lampung Timur	417.155	69,9	337.090	61,7	179.831	30,1	209.213	38,3
Jumlah	2.853.585	59	2.588.884	59	1.955.689	41	1.824.586	41
Jumlah Suara Pilpres	4.809.274							
Jumlah Suara DPRD Provinsi	4.413.470							

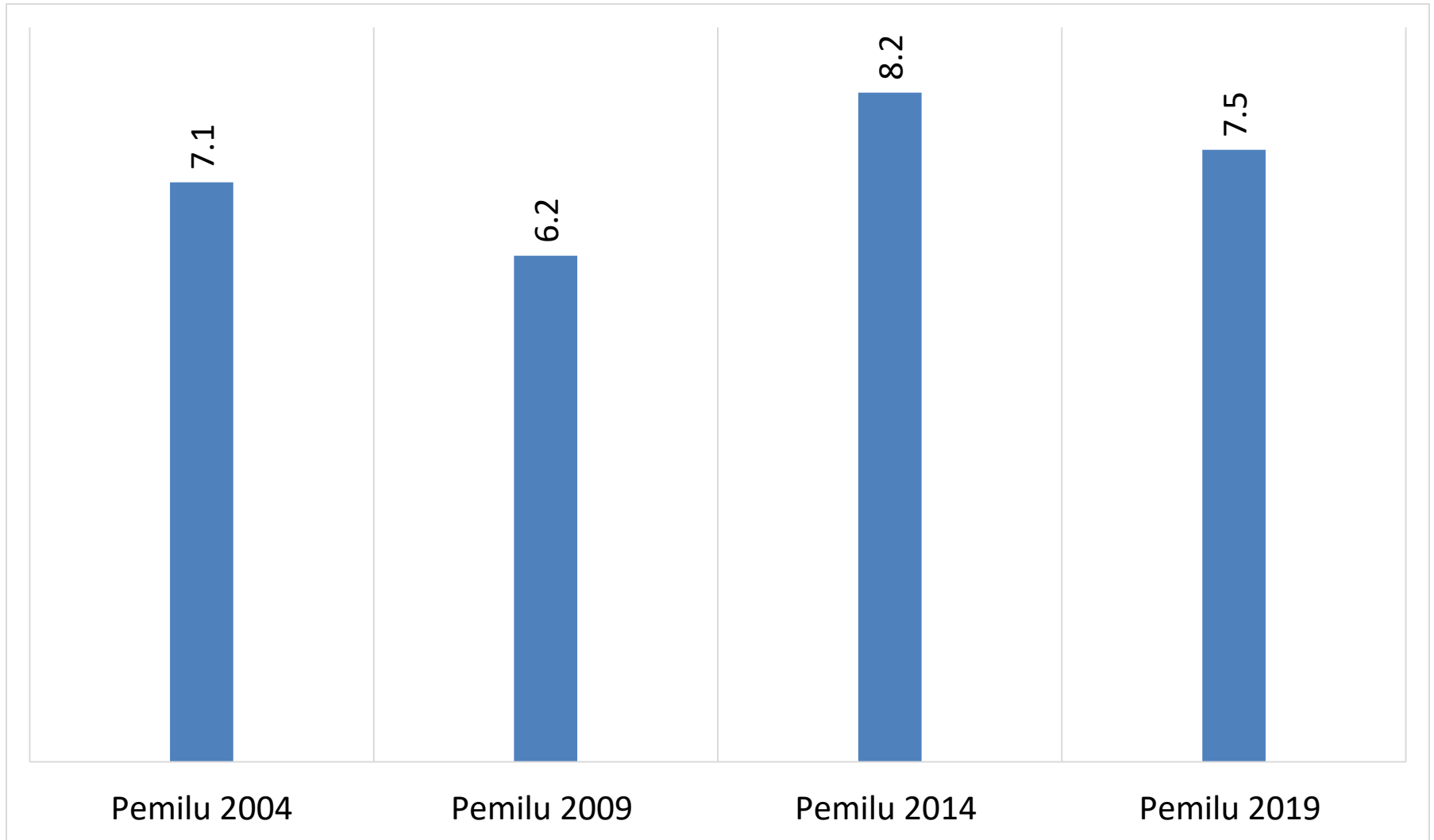
diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung

Coattail Effect di Level DPRD Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Koalisi Jokowi-Ma'ruf				Koalisi Prabowo-Sandi			
	Pilpres	%	DPRD Prov	%	Pilpres	%	DPRD Prov	%
Kota Bandung	621.969	5,8	658.944	5,4	867.945	5,4	711.164	6,2
Kota Cimahi	120.813	1,1	143.235	1,2	214.452	1,3	158.893	1,4
Bandung	778.826	7,2	988.350	8,1	1.246.921	7,8	865.315	7,5
Bandung Barat	359.220	3,3	445.607	3,7	649.988	4,0	464.270	4,0
Cianjur	461.787	4,3	589.735	4,8	775.354	4,8	515.546	4,5
Sukabumi	400.644	3,7	502.323	4,1	1.012.116	6,3	712.299	6,2
Kota Sukabumi	61.835	0,6	70.959	0,6	139.106	0,9	103.128	0,9
Bogor	862.122	8,0	1.052.296	8,6	2.035.552	12,7	1.444.441	12,5
Kota Bogor	228.112	2,1	247.091	2,0	399.073	2,5	306.006	2,7
Kota Bekasi	617.907	5,7	635.920	5,2	752.254	4,7	618.470	5,4
Kota Depok	464.472	4,3	429.194	3,5	618.527	3,8	553.725	4,8
Bekasi	593.424	5,5	662.242	5,4	1.046.487	6,5	762.957	6,6
Purwakarta	155.863	1,4	258.271	2,1	406.988	2,5	223.726	1,9
Karawang	584.682	5,4	637.113	5,2	779.266	4,8	530.760	4,6
Majalengka	346.980	3,2	403.779	3,3	425.877	2,6	259.304	2,2
Sumedang	310.579	2,9	362.502	3,0	408.929	2,5	282.669	2,5
Subang	537.114	5,0	492.162	4,0	392.882	2,4	289.397	2,5
Cirebon	823.900	7,7	676.168	5,5	449.455	2,8	397.500	3,4
Indramayu	707.324	6,6	641.880	5,3	282.349	1,8	205.384	1,8
Kota Cirebon	103.878	1,0	84.615	0,7	93.036	0,6	74.084	0,6
Ciamis	303.323	2,8	338.316	2,8	440.240	2,7	345.782	3,0
Kuningan	252.373	2,3	265.097	2,2	376.259	2,3	277.149	2,4
Kota Banjar	63.295	0,6	71.235	0,6	55.732	0,3	37.225	0,3
Pangandaran	164.073	1,5	184.144	1,5	96.943	0,6	61.471	0,5
Garut	412.136	3,8	702.357	5,8	1.068.444	6,6	642.562	5,6
Tasikmalaya	302.132	2,8	495.218	4,1	729.024	4,5	457.135	4,0
Kota Tasikmalaya	111.785	1,0	162.165	1,3	314.247	2,0	224.983	2,0
Jumlah	10.750.568	40,1	12.200.918	51,4	16.077.446	59,9	11.525.345	48,6

Jumlah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung

ENPP DPR



ENPP DPRD

No.	Partai Politik	Provinsi Jawa Barat				Provinsi Lampung			
		2014		2019		2014		2019	
		Perolehan Kursi	Indeks ENPP	Perolehan Kursi	Indeks ENPP	Perolehan Kursi	Indeks ENPP	Perolehan Kursi	Indeks ENPP
1	PKB	7	7,8	12	7,0	7	8,3	9	7,4
2	Gerindra	11		25		10		11	
3	PDIP	20		20		17		19	
4	Golkar	17		16		10		10	
5	Nasdem	5		4		8		9	
6	Garuda	0		0		0		0	
7	Berkarya	0		0		0		0	
8	PKS	12		21		8		9	
9	Perindo	0		1		0		0	
10	PPP	9		3		4		1	
11	PSI	0		0		0		0	
12	PAN	4		7		8		7	
13	Hanura	3		0		2		0	
14	Demokrat	12		11		11		10	
15	PBB	0		0		0		0	
16	PKPI	0		0		0		0	
Jumlah		100		120		85		85	

Dapil Besar dan Kebingungan Pemilih

Secara keseluruhan di Pemilu Serentak 2019 terdapat 80 dapil DPR RI, 272 dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 dapil DPRD Kabupaten/Kota.

Perbandingan Daerah Pemilihan Lampung dan Jawa Barat^[1]

Keterangan Daerah Pemilihan	Provinsi Lampung		Provinsi Jawa Barat	
	DPR	DPRD	DPR	DPRD
Jumlah Dapil	2	8	12	15
Maksimal Alokasi Kursi	10	12	10	12
Minimal Alokasi Kursi	10	10	6	3

^[1] Dilihat dari lampiran UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

DISPARITAS ANGKA SURAT SUARA TIDAK SAH

Nasional

Jenis Surat Suara Tidak Sah	Jumlah	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11, 12%

Diperoleh dari infografis yang dipublikasi oleh KPU pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD, Selasa, 21 Mei 2019

Lokal

Jenis Surat Suara Tidak Sah	Provinsi Jawa Barat		Provinsi Lampung	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Pemilu Presiden	648.065	2,3	86.311	1,8
Pemilu DPR	2.970.984	10,8	544.007	11,2
Pemilu DPRD Provinsi	3.659.012	15,4	562.619	12,7

Diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu Presiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung

Perbandingan Pemilih Mencoblos Logo Partai dan Nama Caleg di Pemilu DPRD Provinsi^[1]

Keterangan	Jawa Barat		Lampung	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Suara Partai	8.346.233	34,2	1.331.400	30,6
Suara Caleg	16.069.963	65,8	3.014.319	69,4
Total	24.416.196		4.345.719	

^[1] diolah dari Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara DC.1 Pemilu DPRD di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Lampung

Catatan Temuan

Coattail effect tidak signifikan terjadi pada level DPR RI dengan *vote share* tertinggi dari *coattail effect* 2-4% kenaikan dari Pemilu 2014 lalu.

Secara koalisi partai pemenang presiden mendapatkan mayoritas kursi DPR yang bisa jadi tidak disebabkan oleh *coattail effect* melainkan jumlah partai koalisi yang banyak namun tidak ada yang berubah dari sistem kepartaian

Disertakannya pemilu DPRD bisa jadi salah satu penyebab dari *coattail effect* yang tidak signifikan karena membagi fokus perhatian pemilih.

Pemilih fokus pada pemilu presiden dan besaran alokasi kursi besar ditengah district magnitude besar membingungkan pemilih

REKOMENDASI PERBAIKAN SISTEM

Pemilu Serentak Nasional



Pemilu Serentak Lokal



- Menghapus ambang batas pencalonan presiden & kepala daerah;
- Memperkecil besaran alokasi kursi per Dapil dari 3-10 menjadi 3-8/3-6 dapat berdampak pada kemudahan pemilih untuk mengenali caleg sekaligus melakukan penyederhanaan partai politik secara alamiah.

Evaluasi Pemilu 2019: dari Sistem ke Manajemen



www.perludem.org



[@pemiludandemokrasi](https://www.facebook.com/pemiludandemokrasi)

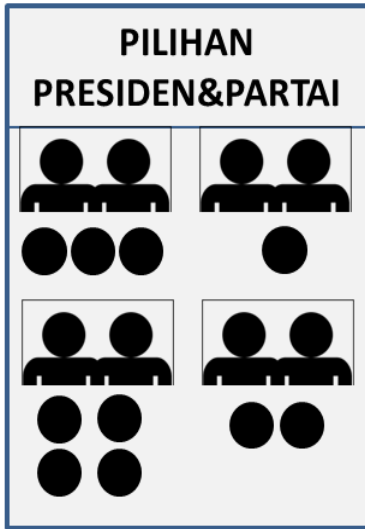


[@perludem](https://twitter.com/perludem)

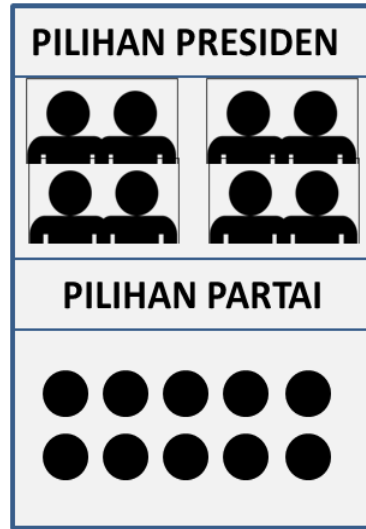


[@perludem](https://www.instagram.com/perludem)

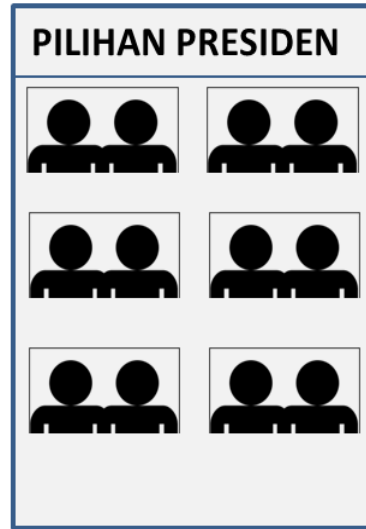
No	Masalah Manajemen Terdampak Sistem	Masalah Murni Manajemen Terlepas Sistem
1	Penggabungan Pemilu DPR & DPRD (Provinsi + DPRD Kab./Kota), memecah konsentrasi kepentingan nasional & lokal.	Rekrutmen petugas TPS tak optimal. Berkebutuhan melibatkan warga muda & Bimtek yang cukup.
2	Dapil amat besar (DPR: 3-10 DPR & DPRD: 3-12). Kepesertaan pemilu riuh & membingungkan.	Simulasi Tungsura di TPS lebih menekankan layanan kepada pemilih. Aspek kualitas & stamina petugas TPS terabaikan (misal: formulir rumit).
3	Ambang batas pencalonan presiden berdasar kursi/suara pemilu sebelumnya. Polarisasi massa dengan tekanan psikologis negatif melalui hoax, fake news, bahkan kriminalisasi.	Paradigma sentralistik: penanganan sengketa pemilu & pengadaan logistik. Kurang mempertimbangkan konsekuensi teknis sehingga membebani petugas lapangan.
4		Penerapan teknologi pemilu secara manual. Contoh: Sipol & Situng. Menurunkan kualitas transparansi dan akuntabilitas.



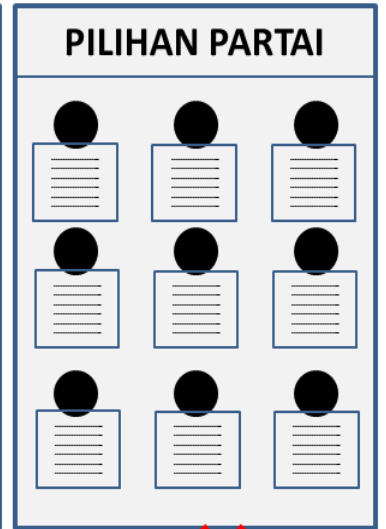
Model Surat Suara 1



Model Surat Suara 2 ❌



Model Surat Suara 3 ❌



MAKIN MENYATU SURAT SUARA, MAKIN SEDERHANA PENCALONAN, MAKIN OPTIMAL COATTAIL EFFECT, AKAN TERHINDAR PEMERINTAHAN TERBELAH

KETERANGAN



: Surat Suara



: pasangan calon presiden-wakil presiden



: Lambang Partai Politik



: Daftar Caleg

MENUMPUK PEMILU & MEMISAHKAN SURAT SUARA

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPD	DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPR RI	DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD KAB/KOTA	DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN] DPRD PROVINSI
KELOMPOK PENYELENGGARA PENGUNGUTAN SUARA (KPPS)	KELOMPOK PENYELENGGARA PENGUNGUTAN SUARA (KPPS)	KELOMPOK PENYELENGGARA PENGUNGUTAN SUARA (KPPS)	KELOMPOK PENYELENGGARA PENGUNGUTAN SUARA (KPPS)	KELOMPOK PENYELENGGARA PENGUNGUTAN SUARA (KPPS)
PROVINSI :	KABUPATEN / KOTA :	KABUPATEN / KOTA :	PROVINSI : [NAMA PROVINSI]	KABUPATEN / KOTA :
KABUPATEN / KOTA :	KECAMATAN / DISTRIK :	KECAMATAN / DISTRIK :	KABUPATEN / KOTA : [NAMA KABUPATEN/KOTA]	KECAMATAN / DISTRIK :
KECAMATAN / DISTRIK :	DESA / KELURAHAN :	DESA / KELURAHAN :	KECAMATAN / DISTRIK :	DESA / KELURAHAN :
DESA / KELURAHAN :	RT :	RT :	DESA / KELURAHAN :	RT :
RT :	KETUA :	KETUA :	RT :	KETUA :
KETUA :	WAKIL :	WAKIL :	KETUA :	WAKIL :
WAKIL :	TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :	WAKIL :	TANDA TANGAN :
TANDA TANGAN :			TANDA TANGAN :	

DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]	DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]	DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]	DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]	DAERAH PEMILIHAN [NAMA DAERAH PEMILIHAN]
SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019	SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019	SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019	SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI [NAMA PROVINSI] TAHUN 2019	SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA [NAMA KABUPATEN/KOTA] TAHUN 2019
01	02	03	04	05
06	07	08	09	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80

SURAT SUARA PEMILU FILIPINA

SURAT SUARA PEMILU SRI LANKA



BARANG TERBUK
Pilihan Umum
1978, 1979, 1983, 1979



BARANG TERBUK
Pilihan Umum
1978, 1979, 1979, 1979



PARTY / PARTI			
1. LAKSANA PARTI	2. ANJALAN PARTI	3. PARTI BERSAMA-SAMA	4. PARTI BERSEKUTU
5. PARTI BERSEKUTU	6. PARTI BERSEKUTU	7. PARTI BERSEKUTU	8. PARTI BERSEKUTU
9. PARTI BERSEKUTU	10. PARTI BERSEKUTU	11. PARTI BERSEKUTU	12. PARTI BERSEKUTU
13. PARTI BERSEKUTU	14. PARTI BERSEKUTU	15. PARTI BERSEKUTU	16. PARTI BERSEKUTU
17. PARTI BERSEKUTU	18. PARTI BERSEKUTU	19. PARTI BERSEKUTU	20. PARTI BERSEKUTU
21. PARTI BERSEKUTU	22. PARTI BERSEKUTU	23. PARTI BERSEKUTU	24. PARTI BERSEKUTU
25. PARTI BERSEKUTU	26. PARTI BERSEKUTU	27. PARTI BERSEKUTU	28. PARTI BERSEKUTU
29. PARTI BERSEKUTU	30. PARTI BERSEKUTU	31. PARTI BERSEKUTU	32. PARTI BERSEKUTU
33. PARTI BERSEKUTU	34. PARTI BERSEKUTU	35. PARTI BERSEKUTU	36. PARTI BERSEKUTU
37. PARTI BERSEKUTU	38. PARTI BERSEKUTU	39. PARTI BERSEKUTU	40. PARTI BERSEKUTU

PARTY / PARTI			
1. LAKSANA PARTI	2. ANJALAN PARTI	3. PARTI BERSAMA-SAMA	4. PARTI BERSEKUTU
5. PARTI BERSEKUTU	6. PARTI BERSEKUTU	7. PARTI BERSEKUTU	8. PARTI BERSEKUTU
9. PARTI BERSEKUTU	10. PARTI BERSEKUTU	11. PARTI BERSEKUTU	12. PARTI BERSEKUTU
13. PARTI BERSEKUTU	14. PARTI BERSEKUTU	15. PARTI BERSEKUTU	16. PARTI BERSEKUTU
17. PARTI BERSEKUTU	18. PARTI BERSEKUTU	19. PARTI BERSEKUTU	20. PARTI BERSEKUTU
21. PARTI BERSEKUTU	22. PARTI BERSEKUTU	23. PARTI BERSEKUTU	24. PARTI BERSEKUTU
25. PARTI BERSEKUTU	26. PARTI BERSEKUTU	27. PARTI BERSEKUTU	28. PARTI BERSEKUTU
29. PARTI BERSEKUTU	30. PARTI BERSEKUTU	31. PARTI BERSEKUTU	32. PARTI BERSEKUTU
33. PARTI BERSEKUTU	34. PARTI BERSEKUTU	35. PARTI BERSEKUTU	36. PARTI BERSEKUTU
37. PARTI BERSEKUTU	38. PARTI BERSEKUTU	39. PARTI BERSEKUTU	40. PARTI BERSEKUTU

මහා මැතිවරණය 2016

Party Vote Area

01	එක්සත් ජාතික පක්ෂය		<input checked="" type="checkbox"/>
02	එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය		<input type="checkbox"/>
03	ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ		<input type="checkbox"/>
04	නව පුජානන්ත්‍රවාදී පෙරමුණ		<input type="checkbox"/>
05	ජාතික හෙල උරුමය		<input type="checkbox"/>
06	පිවිතුරු හෙල උරුමය		<input type="checkbox"/>
07	මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය		<input type="checkbox"/>
08	ලංකා සම සමාජ පක්ෂය		<input type="checkbox"/>
09	ඉලංගෙයි නමිල් ආරඝු කවිවි		<input type="checkbox"/>
10	ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය		<input type="checkbox"/>
11	මහජන එක්සත් පෙරමුණ		<input type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Masalah Berulang Daftar Pemilih

❖ Kenapa DPT saban pemilu bermasalah?

- ✓ DP4 bukanlah data bersih.
- ✓ Tidak ada mekanisme baku untuk mencegah pemilih ganda (tak ada standar aturan kapan seseorang boleh dihapus dari daftar pemilih ketika cokolit, dan Situng tak optimal menghapus data pemilih ganda).
- ✓ Masukan dari peserta pemilu terhadap daftar pemilih baru terjadi di tingkat pusat.

❖ Kondisi Khusus Pemilu Serentak 2019

- ✓ Kewajiban e-KTP berkontribusi pada penetapan DPT berlarut. DPTHP3 ditetapkan pada 8 April 2019, sepuluh hari sebelum hari H.
- ✓ Putusan MK mengenai pendataan pemilih pindah memilih hingga H-7.

Petugas TPS Yang Penting Tersedia

- Larangan bagi penyelenggara pemilu yang telah dua kali menjadi KPPS, honor yang sedikit, beban yang berat, dan polarisasi politik menyebabkan sedikit orang mendaftar sebagai KPPS.
- Bimtek tidak maksimal akibat terlalu banyak jumlah KPPS yang mesti dilatih.
- Banyak ditemukan pelanggaran KPPS oleh Bawaslu.

Logistik Terpusat, Masalah Tersebar

1. DPT yang berlarut-larut membuat proses perencanaan, pengadaan, dan distribusi logistik bermasalah.
2. Keluarnya Putusan MK yang dekat dengan hari pemungutan suara menyulitkan penyelenggara pemilu.
3. Pengadaan logistik yang terpusat, membuat proses pengadaan logistik terhambat.
4. Pemilu Serentak menyebabkan kompleksitas dalam distribusi surat suara. Terdapat 2.593 desain surat suara yang harus didistribusikan. Termasuk logistic untuk 650 TPS tambahan yang logistiknya harus disiapkan H-7 hari pemungutan suara.
5. Kondisi gudang penyimpanan yang kurang baik.
6. Silog tak didesain sebagai platform untuk meringkas rantai komunikasi antara penyelenggara pemilu dengan produsen logistik.

Sipol

Manfaat Sipol sebagai sistem integritas Parpol:

1. Membantu penyelenggara pemilu dalam pendaftaran Parpol calon peserta pemilu (Sipol diisi oleh partai, bukan KPU).
2. Mempercepat pendaftaran karena data sudah terkategoriisasi.
3. Dapat mendeteksi keanggotaan ganda.
4. Bermanfaat dalam tahap verifikasi faktual keanggotaan partai.
5. Transparansi data pemilu ke publik, termasuk keuangan Parpol sebelum dan saat pemilu.

Sipol gagal diterapkan sebagai penentu kepesertaan Parpol di Pemilu karena ditolak Parpol dan Bawaslu.

Situng

- Pada praktiknya, Situng sulit diakses oleh penyelenggara pemilu di daerah, Form Salinan C1 lambat terkonsolidasi dan sulit diunduh.
- Sementara entri data, menjelma menjadi kontroversi akibat kasus salah entri data. Temuan operator KPU RI, terdapat 90 ribu salah entri.
- Situng dipandang bermanfaat oleh peserta pemilu yang tak dapat menyediakan saksi di semua TPS.

REKOMENDASI PERBAIKAN MANAJEMEN

- Desentralisasi logistik;
- Mengoptimalkan teknologi sistem informasi untuk membantu kerja manajemen pemilu;
- Memberikan landasan hukum penggunaan Sipol & Situng juga teknologi lainnya di revisi UU Pemilu.
- Melakukan simulasi pungut-hitung secara komprehensif, dan mengakomodasi kepentingan petugas TPS.
- Ketat menerapkan tes kesehatan dalam rekrutmen petugas TPS.
- Menyederhanakan perangkat administrasi seperti surat suara dan ragam formulir TPS.